

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Perkembangan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia	5
1.1.2. Keterlibatan Aktif Masyarakat Memajukan Pendidikan Nasional	16
1.2. Rumusan Masalah	23
1.3. Tujuan Penelitian	24
1.4. Manfaat Penelitian	24
1.5. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	29

2.1.1. Teori Perundang-undangan dan Teori Hukum Murni Hans Kelsen	29
2.1.2. Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch	38
2.1.3. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman	42
2.2. Landasan Konseptual	48
2.2.1. Konsep Pengaturan dalam <i>Ius Constitutum</i>	48
2.2.2. Konsep Hubungan dengan Pemangku Kepentingan dalam <i>Ius Operatum</i> atas Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah	53
2.2.3. Konsep Penyelesaian Persoalan Kesenjangan Hukum dalam Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah	58

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian	66
3.2. Bahan Hukum	73
3.3. Metode Perolehan Data	76
3.4. Jenis Data dan Pendekatan	77
3.5. Pengolahan dan Analisis Data	79

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pendidikan Dasar dan Menengah yang Didirikan dan Diselenggarakan oleh Swasta di Indonesia	83
---	----

4.1.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	86
4.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	99
4.1.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan	104
4.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dan Perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan	107
4.2. Kesenjangan Penerapan Peraturan yang Dialami oleh Pihak Swasta dalam Pendirian Sekolah & Penyelesaiannya	112
4.2.1. Hubungan Hukum Para Pemangku Kepentingan dalam Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah	112
4.2.2. Kesenjangan Hukum; Syarat Kepemilikan Lahan Atas Nama Badan Penyelenggara vs Prinsip Nirlaba Yayasan Sebagai Badan Hukum	118
4.2.3. Kebijakan yang Tidak Mempermudah Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah SPK oleh Swasta	130
4.2.4. Kebijakan Moratorium di Daerah Tertentu atas Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jenjang	

Menengah Atas (SMA)	136
4.2.5. Penyelesaian atas Kesenjangan Hukum Melalui Musyawarah antar Pemangku Kepentingan dan Perumusan Regulasi yang Mengakomodir Kepentingan Berbagai Pihak	141
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	149
5.2. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	152

